



Pedagang TM 2 Protes Relokasi

Tak Pernah Dilibatkan dalam Perencanaan

JOGJA – Para pedagang Teras Malioboro (TM) 2, Kota Jogja, terus berupaya menolak rencana relokasi mereka ke Ketandan dan Beskalan. Mereka menyanggah pernyataan Gubernur DIJ Hamengkubuwono (HB) X beberapa waktu lalu soal adanya kontrak dalam relokasi di TM 2 antara pedagang secara personal dengan pemprov, bukan paguyuban.

Dalam aksi di TM 2 kemarin (17/7), para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma (PTD) menegaskan mempunyai bukti untuk menyangkal pernyataan HB X tersebut. Ketua PTD Supriyati memastikan, anggota paguyuban belum pernah menandatangani kontrak dengan Pemprov DIJ.

"Selama relokasi jilid pertama dari selasar Jalan Malioboro pindah ke TM 2, kami belum pernah menandatangani surat perjanjian apapun," ujarnya dalam konferensi pers di TM 2 kemarin.

Dia melanjutkan, apabila kontrak dilakukan perseorangan, tentu seluruh pedagang TM 2 dilibatkan. Yang terjadi di lapangan,



TOLAK PINDAH: Para pedagang Teras Malioboro 2 menyampaikan keberatan atas rencana relokasi kemarin (17/7).

para pedagang hanya pernah mengikuti validasi atau pencocokan data oleh UPT Cagar Budaya. "Kami ingin ada ruang dialog. Selama ini hanya satu arah dan sosialisasi belaka," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, HB X menegaskan, rencana relokasi pedagang TM 2 ke Beskalan dan Ketandan sudah disampaikan saat mereka masih berdagang di sepanjang Jalan Malioboro. "Kami sudah bicara (kepada pedagang) bahwa di situ (TM 2) hanya (ditempati) dua tahun," kata HB X di Kompleks Kepatihan Senin (15/7) lalu.

Dia juga mengomentari aksi pedagang yang belakangan ramai menolak relokasi dengan mengatasmakan Paguyuban Tri Dharma. HB X menyam-

paikan bahwa pemprov tidak mengenal paguyuban atau koperasi itu. Pemprov hanya melakukan kontrak personal dengan pedagang, bukan paguyuban.

Ketua Koperasi PTD Arif Usman menambahkan, pihaknya tidak antirelokasi atau antipemerintah. Dia mengutarakan, para pedagang hanya ingin dilibatkan dalam perencanaan agar relokasi bisa transparan dan makin menyejahterakan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Bidang Kesra Krisnadi Setyawan menyatakan, karena itu, tidak demokratis apabila organisasi atau paguyuban tidak dilibatkan dalam perencanaan relokasi ke Ketandan dan Beskalan tersebut. **(oso/dri)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005